

## Jokowi Singgung Kemenhan dan Polri yang Impor Seragam hingga Senjata

JAKARTA (IM) - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta Kementerian Pertahanan (Kemenhan) dan Polri untuk membeli seragam dan senjata buatan dalam negeri.

Kepala Negara menyatakan, pengadaan seragam dan senjata bagi aparat seharusnya tidak perlu melalui impor karena industri dalam negeri sudah mampu menyediakannya, bahkan mengekspornya.

"Saya minta di Kemenhan, di Polri, seragam militer. Kita ini sudah bikin, ekspor ke semua negara, eh kita malah beli dari luar, sepatu, senjata, kita bisa bikin lho," kata Jokowi, dalam pembukaan Business Matching Produk Dalam Negeri di Istora Senayan, Jakarta, Rabu (15/3).

Menurutnya, sah-sah saja bila alat utama sistem persenjataan (alutsista) yang canggih seperti pesawat tempur dibeli dari luar negeri.

"Tapi kalau senjata, peluru, kita sudah bisa. Apalagi hanya sepatu, kenapa harus beli dari luar?" ujar Jokowi.

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu pun menyoroti soal pengadaan makanan bagi para prajurit. Ia mengaku mendapat cerita dari Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan bahwa penyedia makanan bagi prajurit masih sama, sejak Luhut masih menjadi tentara hingga sekarang menjabat sebagai menteri.

"Mestinya semakin banyak penyedia, akan semakin baik karena harganya pasti akan kompetitif. Nanti akan saya cek, bener enggak," kata Jokowi.

Jokowi juga menyebutkan bahwa ia sudah berulang kali menekankan agar seluruh jajaran pemerintah menggunakan produk dalam negeri guna mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia.

"Dengan kita membeli produk-produk dalam negeri, otomatis pertumbuhan ekonomi kita akan naik, kemudian juga barang-barang produksi kita sendiri juga bisa kita gunakan," kata Jokowi. ● **mei**

## Mendagri Ungkap Kemungkinan Pemilu 2024 Ditunda jika Perppu Ditolak

JAKARTA (IM) - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian bersyukur fraksi-fraksi di Komisi II DPR menyepakati rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Keputusan itu menegaskan bahwa Pemilu 2024 tetap berjalan sesuai rencana.

"Semua fraksi yang telah menyatakan menyetujui, dengan demikian kami kira sangat penting dan sangat strategis dan memang kami kira dalam UUD 1945 diatur dalam Pasal 22 bahwa Perppu itu hanya dua opsinya, yaitu disetujui atau ditolak," kata Tito dalam rapat kerja (Raker) Komisi II DPR, Rabu (15/3).

Ia mengatakan, jika Komisi II menolak rancangan Perppu Pemilu, penundaan Pemilu 2024 bisa menjadi konsekwensinya. Sebab, pemerintah bisa saja mengeluarkan aturan baru untuk mencabut perppu tersebut.

"Akibatnya berarti tidak ada peserta pemilu, kalau peserta pemilu tidak ada,

berarti pemilunya ditunda," ungkapnya.

"Sehingga dengan dinyatakan disetujui, diterima Perppu ini, maka artinya tahapan pemilu ini tetap berjalan sesuai dengan tahapan yang sudah diatur oleh KPU," kata Tito menambahkan.

Sebelumnya, seluruh fraksi di Komisi II DPR menyepakati rancangan Perppu Pemilu. Hal itu diketahui dalam Raker Komisi II bersama Tito Karnavian beserta perwakilan Menteri Hukum dan HAM, Rabu.

"Dari 9 fraksi yang ada di DPR disetujui dan menerima rancangan UU tentang Perppu ini untuk kemudian selanjutnya dibahas untuk pengambilan keputusan di tingkat I pada hari ini, setuju ya?" kata Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia saat memimpin rapat, Rabu (15/3).

"Setuju," jawab para peserta rapat diiringi ketukan palu Doli tanda persetujuan.

Setelah ini, Perppu Pemilu akan dibawa kepada pengambilan keputusan tingkat II atau rapat paripurna. ● **han**

# 2 Polhukam

FOTO: ANTARA



## PEMBUKAAN PATMA YUDHISTIRA I/23 BAKAMLA

Kepala Badan Keamanan Laut Laksdya TNI Aan Kurnia (kedua kanan), Pangkoarmada II Laksda TNI Maman Firmansyah (kanan) dan Kepala Bakamla Zona Maritim Tengah Laksma TNI Hanarko Djodi Pamungkas (kiri) menginspeksi armada kapal patroli usai apel Patroli Bersama (Patma) Yudhistira I/23 di Pelabuhan Samudera, Bitung, Sulawesi Utara, Rabu (15/3). Patroli bersama yang melibatkan unsur kapal patroli TNI AL, Polair Polda Sulut, Dirjen Perhubungan Laut (Hubla), Pengawasan Sumber Daya Laut dan Perikanan (PSDKP), Dirjen Bea Cukai, serta Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai tersebut akan melakukan pengawasan dan penindakan segala bentuk pelanggaran dan aktivitas ilegal laut di wilayah Alur Laut Kepulauan Indonesia 1,2, dan 3 secara terkoordinasi, efektif dan efisien.

# Anwar Usman dan Saldi Isra Terpilih Jadi Ketua dan Wakil Ketua MK 2023-2028

Sebagai pimpinan MK yang baru, Anwar Usman dan Saldi Isra tegaskan perlunya penguatan MK sebagai institusi menghadapi Pemilu dan Pilkada Serentak 2024.

JAKARTA (IM) - Anwar Usman kembali terpilih menjadi Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) untuk periode 2023-2028. Sementara Profesor Saldi Isra terpilih sebagai Wakil Ketua MK.

Berdasarkan hasil pemungutan suara dalam Rapat Pleno Hakim Pemilihan Ketua dan Wakil Ketua MK pada Rabu (15/3) yang dihadiri seluruh hakim konstitusi, Anwar menang atas Arief Hidayat dengan perolehan 5 berbanding 3 suara.

"Yang Mulia Hakim Konstitusi Anwar Usman terpilih sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi masa jabatan 2023-2028," ujar Anwar yang memimpin rapat, Rabu (15/3), disusul ketukan palu.

Pemungutan suara untuk

memilih Ketua MK berlangsung 2 putaran, sebab Anwar Usman dan Arief Hidayat berbagi 4 suara di putaran pertama. Sementara itu, 1 suara dinyatakan tidak sah karena terdapat 2 nama kandidat yang dilindungi.

Pada putaran kedua, Anwar kembali berbagi 4 suara dengan Arief, karena 1 suara di putaran kedua juga tidak sah karena terdapat 2 nama kandidat yang dilindungi.

Sementara itu, pemungutan suara di forum yang sama menetapkan Saldi Isra sebagai Wakil Ketua MK periode 2023-2028. Saldi memperoleh 5 suara, unggul atas Daniel Yusmie Foekh yang beroleh 3 suara. Satu hakim konstitusi abstain menentukan Wakil Ketua MK.

"Yang Mulia Hakim Konstitusi Profesor Saldi Isra terpilih sebagai Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi masa jabatan 2023-2028," kata Anwar disusul ketukan palu.

## Fokus Hadapi Pemilu 2024

Anwar Usman dan Saldi Isra menyinggung perlunya penguatan MK sebagai institusi menghadapi Pemilu dan Pilkada Serentak 2024, di mana MK akan menghadapi berbagai perselisihan hasil pemilihan umum.

"Catatan atau kritik, yang pahit sekalipun, bagi kami berdua jadi obat untuk membawa MK ke depan, lebih-lebih lagi untuk menghadapi Pemilu

Serentak 2024," kata Anwar setelah Rapat Pleno Hakim Pemilihan Ketua dan Wakil Ketua MK pada Rabu (15/3).

"Kami memohon kepada rekan-rekan media untuk membantu kami dalam memajukan demokrasi dalam MK secara umum," lanjutnya.

Hal senada diutarakan Saldi Isra. Hakim konstitusi usulan Presiden RI itu menyoroti perlunya soliditas internal menghadapi tahun politik.

"Karena 2024 (MK) akan menghadapi agenda nasional, sengketa pemilu, baik pemilihan presiden, pemilihan legislatif, dan akan pemilihan kepala daerah juga, soliditas di internal itu menjadi se-

suatu yang akan kami jaga ke depan," ungkapnya dalam kesempatan yang sama.

Seperti diketahui, belakngan ini MK kerap diterpa kontroversi, mulai dari intervensi DPR RI atas komposisi hakim konstitusi secara sepihak, hingga skandal pengubahan substansi putusan perkara yang saat ini sedang diutus Majelis Kehormatan MK.

"Kami tentu akan menghadapi tugas yang tidak ringan ke depan. Dengan 9 hakim konstitusi, kami sudah berdiskusi dari hati ke hati ketika proses awal bahwa kita ke depan harus bekerja memulihkan kepercayaan publik kepada MK," kata Saldi. ● **han**

## Penyidik KPK Sita Sejumlah Barang Bukti Saat Geledah Rumah Eks Bupati Langkat

JAKARTA (IM) - Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan pengeledahan di lima lokasi berbeda di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara (Sumut), di antaranya rumah mantan Bupati Langkat, Terbit Rencana Perangin-angin (TRP) dan Kantor Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Langkat.

Pengeledahan yang dilakukan pada Selasa (14/3) kemarin, tim KPK menyita sejumlah barang bukti.

"Tim penyidik KPK telah selesai melakukan pengeledahan di beberapa lokasi berbeda di Kabupaten Langkat Sumut," kata Kabag Pemberitaan KPK, Ali Fikri melalui pesan singkat ke wartawan, Rabu (15/3).

"Ada lima lokasi, di antaranya, rumah tersangka TRP dan rumah pihak terkait dengan perkara ini. Selain rumah, tim penyidik juga menggeledah kantor PDAM di Kabupaten Langkat," imbuhnya.

Pengeledahan tersebut berkaitan dengan perkara korupsi yang menjerat Terbit Rencana Perangin-angin (TRP). KPK berhasil mengamankan dokumen termasuk bukti aliran uang dari pengeledahan di lima lokasi di Langkat.

"Dari kegiatan tersebut, tim berhasil mengamankan beberapa dokumen terkait perkara ini. Termasuk bukti dugaan aliran uang," terang Ali.

Ali menerangkan pengeledahan tersebut merupakan salah satu komitmen KPK untuk menuntaskan perkara ini.

"Sehingga bila ada pihak yang turut serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, pasti KPK kembangkan lebih lanjut," katanya.

Sekadar informasi, KPK kembali menetapkan mantan Bupati Langkat, Terbit Rencana Perangin-angin (TRP) sebagai tersangka. Kali ini, Terbit Rencana Perangin-angin ditetapkan sebagai ter-

sangka kasus dugaan penerimaan gratifikasi dan turut serta dalam pengadaan barang jasa di lingkungan Pemkab Langkat.

"Saat ini KPK sedang melakukan penyidikan dan kembali menetapkan TRP selaku Bupati Langkat periode 2019-2024 sebagai tersangka dugaan korupsi penerimaan gratifikasi dan turut serta dalam pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemkab Langkat," kata Ali.

Terbit Rencana Perangin-angin ditetapkan sebagai tersangka dengan dua pasal sekaligus setelah ditemukan bukti permulaan yang cukup. KPK saat ini masih mengumpulkan bukti tambahan untuk menguatkan pasal yang disangkakan terhadap Terbit Rencana Perangin-angin.

Bukti tambahan akan dikumpulkan lewat proses penyidikan. Salah satunya, dengan memeriksa para saksi. KPK sudah mengagendakan pemanggilan terhadap para saksi terkait kasus baru yang kembali menjerat Terbit Rencana.

Sebelumnya, Terbit Rencana Perangin Angin dan kakak kandungnya yang merupakan Kepala Desa Balai Kasih, Iskandar PA telah divonis bersalah atas kasus suap proyek di Pemkab Langkat. Keduanya terbukti menerima suap sebesar Rp572 juta. Uang sebesar Rp572 juta tersebut berasal dari Direktur CV Nizhami, Muara Perangin Angin.

Atas perbuatannya tersebut, hakim menjatuhkan hukuman 9 tahun penjara dan denda Rp300 juta subsidair terhadap Terbit Rencana Perangin-angin. Selain itu, Terbit juga dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak untuk dipilih sebagai pejabat publik selama lima tahun setelah menjalani pidana penjara. ● **han**

LAPORAN KEUANGAN PT ERA GRAHAREALTY Tbk		
Kantor Kedudukan : TCC Batavia Tower One Lantai 8 Suite 3-5 Jl. K.H. Mas Mansyur Kav. 125 Jakarta Pusat 10220 Telp. : (021) 570 8000 / (021) 2967 5123 Faks. : (021) 570 4776 / (021) 570 8082		
Website : www.eraindonesia.com, Email : corsec@eraindonesia.com		
<b>LAPORAN POSISI KEUANGAN</b> Tanggal 31 Desember 2022 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)		
	31 Desember 2022	31 Desember 2021
<b>ASET</b>		
<b>Aset Lancar</b>		
Kas dan setara kas	30.056.999.568	25.317.191.299
Piutang usaha, bersih	1.638.690.638	78.426.176
Biaya dibayar dimuka	236.132.063	108.771.635
<b>Jumlah Aset Lancar</b>	<b>31.931.822.469</b>	<b>25.504.389.110</b>
<b>Aset Tidak Lancar</b>		
Aset tetap, bersih	6.122.223.990	6.770.150.579
Aset pajak tangguhan	1.034.478.500	682.637.560
<b>Jumlah Aset Tidak Lancar</b>	<b>7.156.702.490</b>	<b>7.452.788.139</b>
<b>JUMLAH ASET</b>	<b>39.088.524.959</b>	<b>32.957.177.249</b>
<b>LIABILITAS DAN EKUITAS</b>		
<b>Liabilitas Jangka Pendek</b>		
Utang usaha	127.219.315	207.851.320
Utang lain-lain	116.078.791	49.467.329
Utang akrual	57.550.849	22.334.880
Utang pajak	1.294.031.284	712.941.641
Pendapatan diterima dimuka	671.342.748	795.842.748
Jaminan	596.440.000	610.000.000
Utang bank	-	183.523.725
<b>Jumlah Liabilitas Jangka Pendek</b>	<b>2.862.662.987</b>	<b>2.581.961.643</b>
<b>Liabilitas Jangka Panjang</b>		
Pendapatan diterima dimuka	1.481.063.613	1.714.127.706
Liabilitas imbalan pasca kerja	4.202.175.000	2.877.898.000
<b>Jumlah Liabilitas Jangka Panjang</b>	<b>5.683.238.613</b>	<b>4.592.025.706</b>
<b>JUMLAH LIABILITAS</b>	<b>8.545.901.600</b>	<b>7.173.987.349</b>
<b>EKUITAS</b>		
Modal saham	9.498.685.000	9.498.685.000
Tambahan modal disetor	21.680.872.247	21.680.872.247
Pendapatan komprehensif lain	172.225.560	129.359.880
Defisit	(809.159.448)	(5.525.727.227)
<b>JUMLAH EKUITAS</b>	<b>30.542.623.359</b>	<b>25.783.189.900</b>
<b>JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS</b>	<b>39.088.524.959</b>	<b>32.957.177.249</b>
Catatan: Laporan keuangan pada dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 telah di audit oleh Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradireja (Nexia KPS) dengan opini tanpa modifikasi (Wajar Tanpa Pengecualan), sebagaimana tercantum dalam laporan keuangan Perusahaan tanggal 9 Maret 2023		

## LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	31 Desember 2022	31 Desember 2021
<b>Pendapatan</b>	26.000.934.247	20.278.257.636
Beban langsung	(5.094.675.091)	(3.373.778.988)
<b>LABA KOTOR</b>	<b>20.906.259.156</b>	<b>16.904.478.648</b>
Beban umum dan administrasi	(15.729.088.752)	(12.293.227.047)
<b>LABA USAHA</b>	<b>5.177.170.404</b>	<b>4.611.251.601</b>
<b>Pendapatan (beban) lain-lain</b>		
Pendapatan bunga	463.170.911	357.347.367
Beban keuangan	(3.342.936)	(65.582.968)
Labas atas pelepasan aset tetap	91.891.892	131.818.182
Lain-lain bersih	398.938.082	(20.628.071)
<b>Pendapatan (beban) lain-lain, bersih</b>	<b>950.657.949</b>	<b>402.954.510</b>
<b>LABA SEBELUM PAJAK</b>	<b>6.127.828.353</b>	<b>5.014.206.111</b>
Manfaat (beban) pajak penghasilan	(1.411.260.574)	(1.103.089.305)
<b>LABA TAHUN BERJALAN</b>	<b>4.716.567.779</b>	<b>3.911.116.806</b>
Penghasilan komprehensif lain setelah pajak	42.865.680	(27.363.960)
<b>LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN</b>	<b>4.759.433.459</b>	<b>3.883.752.846</b>
LABA PER SAHAM	5,10	4,11

## LAPORAN ARUS KAS

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	31 Desember 2022	31 Desember 2021
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI</b>		
Penerimaan kas dari pelanggan	23.794.545.492	21.131.081.075
Pembayaran kas kepada pemasok	(11.975.626.591)	(8.678.982.585)
Pembayaran kepada karyawan	(7.417.373.346)	(6.843.886.257)
<b>Kas dihasilkan dari operasi</b>	<b>4.401.545.555</b>	<b>5.608.212.233</b>
Penerimaan bunga	463.170.911	357.347.367
Pembayaran bunga pinjaman	(3.342.936)	(65.582.968)
Pembayaran pajak penghasilan	(359.967.406)	(76.962.461)
Penerimaan (pembayaran) kas lainnya	581.759.522	442.064.814
<b>Kas bersih dari aktivitas operasi</b>	<b>5.083.165.646</b>	<b>6.265.078.985</b>
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI</b>		
Perolehan aset tetap	(251.725.544)	(1.643.350.992)
Penerimaan dari pelepasan aset tetap	91.891.892	131.818.182
<b>Kas bersih untuk aktivitas investasi</b>	<b>(159.833.652)</b>	<b>(1.511.532.810)</b>
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN</b>		
Pembayaran kembali utang bank	(183.523.725)	(734.094.900)
Biaya emisi efek	-	(1.029.662.753)
Penerimaan dari penambahan modal	-	5.709.220.000
<b>Kas bersih dari aktivitas pendanaan</b>	<b>(183.523.725)</b>	<b>3.945.462.347</b>
<b>KENAIKAN BERSIH KAS DAN SETARA KAS</b>	<b>4.739.808.269</b>	<b>8.699.008.522</b>
<b>KAS SETARA KAS PADA AWAL TAHUN</b>	<b>25.317.191.299</b>	<b>16.618.182.777</b>
<b>KAS SETARA KAS PADA AKHIR TAHUN</b>	<b>30.056.999.568</b>	<b>25.317.191.299</b>

Jakarta, 16 Maret 2023  
PT Era Graharealty Tbk  
Direksi

## INFORMASI PENUTUPAN KANTOR CABANG KB BUKOPIN

Yth Nasabah KB Bukopin,

Dengan ini kami informasikan bahwa efektif pada tanggal 14 April 2023 akan dilakukan penutupan layanan Kantor Cabang Operasional sebagai berikut:

### Kantor Cabang Pembantu Kemang

Jalan Kemang Raya No.23, Bangka Mampang Perapatan, Jakarta Selatan - 12730

Terkait dengan penutupan layanan tersebut, Nasabah KB Bukopin tetap dapat melakukan transaksi di seluruh jaringan cabang dan e-channel Bank KB Bukopin.

Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi:  
Halo KB Bukopin 14005 dan Bank KB Bukopin Kantor Sentraya (021) 27881858

Hormat Kami,  
PT Bank KB Bukopin, Tbk

KB Bukopin